

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DIKAMPUNG PERBATAS RI - PNG DALAM PEMILUKADA GUBERNUR PAPUA TAHUN 2018

Melyana Ratana Pugu & Mariana Buiney

Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNCEN Jayapura
Email: puguratana@yahoo.com

Abstrak :

Kawasan perbatasan RI-PNG memiliki banyak permasalahan. Dalam kajian penelitian ini, Penulis melihat partisipasi perempuan perbatasan yang tinggal dikampung Skouw Mabo, Skouw Sae dan Skouw Yambe dalam pemilu gubernur provinsi Papua tahun 2018. Hal ini sejalan dengan cita-cita luhur negara yang telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam undang-undang nomor 7 tahun 1984. Penelitian ini akan dilakukan di tiga kampung tersebut diatas khusus pemilihan perempuan perbatasan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Output atau luaran dari penelitian ini adalah mendapatkan perbandingan pemilihan perempuan dan laki-laki dalam pemilu dilihat dalam perspektif gender dalam hubungan internasional dan tingkat partisipasi pemilihan perempuan yang akan berdampak pada rencana pembangunan yang responsive gender dikawasan perbatasan RI-PNG.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Perempuan, Pemilu, Perbatasan, Skouw

Abstract : The RI-PNG border area has many problems. In this study, the authors would like to see the participation of border women living in Skouw Mabo, Skouw Sae and Skouw Yambe in the 2018 provincial governor election. This is in line with the noble ideals of the state that has ratified the convention for the elimination of all forms of discrimination against women in Act No. 7 of 1984. This research will be conducted in the above three villages specifically for female border voters using qualitative research method with descriptive analysis. The output or outcome of this research is to get the comparison of female and male voters in the election seen in gender perspective in international relations and women's participation rate which will impact on gender responsive development plan in RI-PNG border area.

Keywords: Political Participation, Women, Regional Head Elections, Border, Skouw

PENDAHULUAN

Pembangunan yang ada saat ini mulai dikenal tipe *people centered development* yang mengacu pada manusia sebagai subjek pembangunan dan dimensi ini lebih efektif jika dibandingkan dengan hanya melatih atau menciptakan manusia profesional sebagai instrumen pembangunan. Pembangunan dalam hal ini adalah membangun daerah perdesaan yang selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki gambaran sebagai kawasan yang masih miskin, jauh dari kata modern kota besar, masyarakat yang produktifitasnya rendah, sistem sosial budaya dan kearifan lokalnya masih kental terasa perlu dibangun dengan suatu pembangunan berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal untuk menciptakan masyarakat madani tapi juga adanya keterlibatan kaum wanita sebagai subjek pembangunan. Saat ini perempuan dikenal sebagai penjaga rumah tangga dan pekerja kelas dua.

Dalam peranan di kehidupan sehari-hari perempuan memang belum bisa menggantikan pekerjaan laki-laki secara sepenuhnya, dan ini berakibat pada diskriminatif gender. Seringkali perempuan hanya dipekerjakan sebagai ibu

rumah tangga yang biasanya hanya mencuci, memasak, menjaga rumah dan anak yang pekerjaan tersebut tidak diberi upah. Ketimpangan hal semacam itu membuat perempuan seolah-olah tidak diperhitungkan dalam proses pembangunan dan mengakibatkan kemiskinan.

Pembangunan kampung dalam konteks pemberdayaan masyarakat untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan agar terbentuk dan terciptanya masyarakat yang madani. Pada prosesnya harus menitikberatkan pada keikutsertaan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat yang berada di kampung sebagai faktor penggerak. Kunci pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan optimal adalah dengan memanfaatkan seluruh sumber daya lokal yang ada di desa, sumber daya manusia juga harus dimanfaatkan dengan baik, dengan tidak memandang bias tentang gender sebagai pemisah antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan.

Unsur pemberdayaan sesungguhnya harus memberi celah pada perempuan untuk tetap bisa berkarya dan kreatifitas. Perempuan sekarang sudah tidak bisa dipandang seperti perempuan pada jaman dahulu karena pada

perkembangannya, ternyata perempuan juga bisa memberikan sumbangsih berupa ide, tenaga, dan waktu dalam menciptakan suatu inovasi yang dapat diterapkan di kampung untuk pembangunan. Kita bisa melihat di kota-kota besar, begitu diberdayakannya perempuan dalam bidang industri maupun perkantoran yang mereka merupakan perempuan pekerja yang produktif. Hal seperti itulah yang sebenarnya membuktikan bahwa saat ini perempuan sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai kaum yang terpinggirkan.

Untuk menciptakan kolaborasi maksimal dalam membangun kampung yang lebih baik, maka kolaborasi antara berbagai elemen harus bisa diajak demi menyatukan satu visi dan misi tanpa mendikotomikan gender sebagai bias jurang yang memisahkan.¹

Perempuan yang berada di kawasan perbatasan RI-PNG yang tersebar di tiga kampung perbatasan yaitu kampung Skouw Mabo, Skouw Sae dan Skouw Yambe seharusnya juga memiliki peran yang besar dalam sektor ekonomi, sosial dan politik untuk mengisi pembangunan di kawasan perbatasan. Untuk itu, penelitian ini ingin melihat partisipasi politik perempuan perbatasan dalam pemilu gubernur provinsi Papua tahun 2018 dan dampaknya bagi pembangunan kawasan Skouw sebagai beranda depan RI-PNG.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan perbandingan jumlah pemilih perempuan dan laki-laki di kampung perbatasan Skouw dalam pemilu gubernur provinsi Papua tahun 2018. Selain itu, untuk menganalisa faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tingkat partisipasi pemilih perempuan di kawasan perbatasan Skouw. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan peran perempuan perbatasan dalam pemilu gubernur yang berdampak pada pembangunan responsive gender di perbatasan RI-PNG.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan penelitian dipilih berdasarkan keikutsertaan dalam pilkada Papua tahun 2018. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif untuk mendeskripsikan temuan lapangan kedalam narasi penjelasan permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Secara umum kampung-kampung yang terdapat pada perbatasan RI dengan Papua New Guinea di Distrik Muara Tami Kota Jayapura terdiri dari kampung Skouw Mabo, Skouw Yambe dan Skouw Sae.

Kampung Skouw Mabo

Kampung Skouw Mabo terletak di tengah antara kampung Skouw Yambe dan Skouw Sae. Luas kampung ini 121,15m² dengan jumlah penduduk sebanyak 370 jiwa. Kampung ini terletak di pinggir pantai samudera Pasifik. Terdapat balai kampung dan perumahan masyarakat asli yang terbuat dari kayu maupun beton. Sejak tahun 2017 yang lalu kampung ini dijadikan tempat budidaya penyu oleh pemerintah kota Jayapura dan diharapkan menjadi lokasi wisata masyarakat karena pemandangan alamnya yang indah. Mata pencaharian penduduk Skouw adalah nelayan dan petani. Di kampung ini juga terdapat masyarakat non Papua yang membuka kios dan menetap. Secara sosial budaya, masyarakat setempat masih menerapkan adat istiadat dengan berfungsinya rumah adat ditengah-tengah kampung dan menghormati pemuka adatnya. Terdapat rumah ibadah dan infrastruktur jalan dan penerangan di kampung ini.

Pengamatan penulis pada saat tiba di kampung ini adalah masyarakat asli perbatasan dan juga pendatang yang tinggal di kampung ini sudah ramai berdiri di depan TPS dan depan rumah warga untuk bersiap menuju TPS dan bahkan ada yang sudah memberikan hak pilihnya.

Kampung Skouw Yambe

Kampung Skouw Yambe terletak dibagian barat kampung Skouw Mabo. Kampung ini memiliki luas 112,56 m² dengan jumlah penduduk 522 jiwa. Kampung ini berdasarkan pengamatan penulis merupakan kampung yang lebih padat pemukimannya dibanding kampung Skouw Mabo. Rumah-rumah penduduk berderet rapi terbuat dari beton beratap seng maupun terbuat dari kayu dan beratap rumbia. Terdapat puskesmas di kampung ini. Jalan yang menghubungkan kampung Skouw Yambe dan Skouw Mabo terbuat dari semen, dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat. Pemandangan laut dari kampung ini pun sangat indah dan menurut penulis sangat mungkin dijadikan obyek wisata.

Saat pengamatan suara, masyarakat di kampung ini aktif datang dan memberikan suara mereka. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat asli yang berjejer di dekat TPS. Berdasarkan pengamatan penulis, pemilih perempuan lebih banyak di dekat TPS ini bila dibandingkan lelaki.

¹ https://www.kompasiana.com/denisgoetzhe/peran_wanita_dalam_pembangunan_pedesaan-54f77db0a333114c

Kampung Skouw Sae

Kampung perbatasan ini terletak dibagian tenggara kampung skouw Mabo. secara umum ketiga kampung tersebut saling berhubungan dengan jalan yang disemen oleh PT Hanurata pada awalnya yang kemudian di dibangun oleh masyarakat secara swadiri. Kampung Skouw Sae memiliki luas 110,18 m² dengan jumlah jiwa 298. Kampung ini pun berjejal di sepanjang pantai Skouw yang berbatasan laut dengan samudera Pasifik. Memasuki pantai di pinggiran kampung ini hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki di jalan setapak. Aktivitas masyarakat sehari-hari bercocok tanam dan mencari ikan untuk dikonsumsi sendiri. Di kampung ini terdapat sebuah sekolah dasar dan juga balai kampung.

TPS di kampung ini terletak di SDN Skouw Sae. Saat pemungutan suara pun pemilih ramai mengunjungi gedung sekolah ini. Bahkan ibu-ibu dan pemuda banyak yang tetap duduk menunggu proses penghitungan suara.

Partisipasi Perempuan Perbatasan dalam Pemilu 2018

Pemilihan Gubernur Papua tanggal 27 Juni 2018 terjadi pula secara serentak dikampung perbatasan RI-PNG distrik Muara Tami Kota Jayapura. Dalam survey langsung yang dilakukan oleh peneliti ke kampung-kampung ini terdapat beberapa data primer sebagai berikut. Bahwa kampung perbatasan terdiri dari kampung Skouw Mabo, Skouw Yambe, Skouw Sae dan Moso dengan jumlah TPS sebanyak 7 (tujuh) TPS. 5 TPS berada di Skouw Mabo, Sae dan Yambe sedangkan di Moso terdapat 2 TPS. Dalam survey ini peneliti meninjau dan melihat langsung proses pemilihan di 5 TPS yaitu 1 TPS di Kampung Skouw Mabo, 2 TPS di kampung Skouw Yambe dan 2 TPS di kampung Skouw Sae.

Secara umum jarak antara satu TPS di satu kampung dengan TPS lainnya tidak terlalu berjauhan mampu ditempuh dengan jalan kaki. Proses pemungutan suara berjalan secara lancar dimulai sejak jam 7.30 WIT sampai selesai pada pukul 13.00 wit untuk selanjutnya dilakukan penghitungan suara.

Tabel 1. Jumlah Pemilih di TPS Perbatasan Skouw RI-PNG

No	Tempat Pemungutan Suara	Pemilih Laki-laki	Pemilih Perempuan
1	Skouw Sae 02	111	104
2	Skouw Yambe 01	109	119
3	Skouw Yambe 02	93	109
4	Skouw Mabo 01	175	158
Total		488	490

Sumber : olahan data Primer DPT di TPS, 2018

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah pemilih perempuan dalam daftar pemilih tetap lebih banyak dari jumlah pemilih laki-laki. Secara statistik suara perempuan dikampung perbatasan ini turut menentukan pemenang dalam pemilu gubernur Papua. Hasil survey langsung dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa perempuan di setiap TPS tersebut diatas menunjukkan kecenderungan tingginya partisipasi perempuan perbatasan dalam pemilu Papua 2018.

Hasil wawancara penulis dengan Yonece Nari Pemilih di TPS 01 Skouw Sae bahwa pemilih perempuan diperbatasan sangat antusias untuk datang ke TPS dan memberikan hak suaranya. Menurutnya, pemilih perempuan di Skouw Sae mengetahui tentang pemilihan umum melalui media elektronik radio dan melalui iklan di televisi. Sosialisasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kota Jayapura hanya dilakukan kepada petugas pemilihan distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPPS. Warga diperbatasan tidak diberikan sosialisasi namun sangat inisiatif untuk datang dan memberikan suaranya ke TPS termasuk perempuan.

Di TPS 01 Skouw Mabo, penulis mewawancarai ibu Membilong yang datang bersama dua anaknya yang masih balita. Menurutnya, keinginannya memberikan suara pada pemilu gubernur adalah merupakan kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai warga negara yang tinggal di perbatasan, tanpa paksaan dari pihak manapun dan menginginkan agar gubernur yang terpilih lebih memperhatikan masyarakat perbatasan khususnya kaum perempuan. Selanjutnya di TPS 01 Skouw Yambe, seorang pemuda bernama Patipeme menjelaskan bahwa ini adalah kali pertama dirinya mengikuti pemilihan umum. Harapannya mendapatkan gubernur yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan. Di TPS 02 bersama ibu Sipora Mallo menjelaskan bahwa setiap kali pemilihan umum masyarakat kampung perbatasan sangat berantusias datang memilih dan menurutnya semua perempuan dikampung perbatasan selalu berpartisipasi aktif mengikuti proses pemilihan umum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan pengamatan penulis langsung di setiap TPS diatas pada saat pemilihan umum 27 Juni 2018 lalu menunjukkan tingginya partisipasi perempuan dalam mengikuti proses pemilihan umum di perbatasan Skouw. Hal ini disebabkan karena faktor internal dari dalam diri mereka yaitu adanya kesadaran untuk memberikan hak suaranya dengan harapan pemimpin yang terpilih akan memperhatikan kepentingan perempuan perbatasan dan masyarakat perbatasan secara umum. Selain itu juga berdasarkan pengamatan bahwa perempuan yang datang berpartisipasi

tidak ingin ketinggalan dalam peristiwa penting ini karena pemilihan ini dilakukan secara serentak dan semua warga ramai mengunjungi TPS, semua aktivitas di pusatkan di tempat pemungutan suara, sehingga otomatis semua perempuan datang dan terlibat dalam proses ini.

Dampak partisipasi perempuan perbatasan dalam Pemilu di Papua

Partisipasi perempuan dapat dilihat berdasarkan keikutsertaannya sebagai kandidat politik dan sebagai pemilih atau sebagai subjek dan sebagai obyek. Secara partisipasi perempuan di Indonesia masih digolongkan rendah. Berkaitan dengan partisipasi perempuan, menurut catatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), tingkat partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 tergolong rendah. Angkanya hanya 44 perempuan dari total 614 calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Artinya hanya 6,9 persen. Jika dibandingkan lagi dengan data bahwa 49,2 persen dari total penduduk Indonesia adalah perempuan, tentu angka tersebut memprihatinkan. 44 perempuan itu bertarung di 41 wilayah yang tersebar di 28 kabupaten, 9 kota dan 4 provinsi. Partisipasi perempuan ini menurun jika dibandingkan dengan Pilkada serentak gelombang pertama yang diselenggarakan pada 2015 lalu yaitu sebesar 0,30 persen, dari 7,47 persen menjadi 7,17 persen. Kemudian jika dilihat profil perempuan calon kepala daerah yang bertarung, mereka didominasi oleh tiga latar belakang yaitu eks legislator, kader partai, dan jaringan kekerabatan (Perludem, 2016).

Pada Pemilu 2014 hanya ada 97 (17,3 persen) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Perempuan) dari total 560 kursi yang tersedia. Angka ini menurun dari periode sebelumnya, dimana ada 103 anggota DPR perempuan (18,4 persen). Dampak kesenjangan adalah bahwa Komnas Perempuan mencatat, misalnya di daerah, ada 342 peraturan daerah (perda) yang diskriminatif terhadap perempuan. Perda-perda ini umumnya mengatur soal bagaimana perempuan harus berpakaian, pemisahan ruang publik, dan penerapan jam malam. Di tingkat undang-undang (UU), ada juga yang diskriminatif terhadap perempuan misalnya UU No. 44/2008 tentang Pornografi yang terkesan mengkriminalkan tubuh perempuan.²

Dampak partisipasi perempuan secara nasional diatas turut tercermin dalam partisipasi perempuan perbatasan di kampung Skouw Mabo, Skouw Yambe dan Skouw Sae. Terlihat jelas bahwa perempuan perbatasan dikam-

pung-kampung ini datang secara aktif menyampaikan aspirasi suaranya dengan memilih calon gubernur Papua periode 2018-2023. Tujuan dan harapan mereka adalah gubernur Papua terpilih hendaknya memperhatikan perempuan perbatasan dalam konteks nyata adalah pembangunan sarana kesehatan dan penyediaan dokter dan perawat yang mumpuni dan bekerja sepenuh waktu, terpenuhinya pendidikan melalui pembangunan sekolah dasar dan menengah beserta guru dan perangkat sekolah yang berkualitas; pelatihan dan tersedianya pasar bagi barang kerajinan tangan yang dibuat oleh perempuan perbatasan; tersedianya fasilitas air bersih; fasilitas perumahan yang layak huni sehingga beberapa waktu ke depan tersedia perempuan perbatasan yang siap terlibat dalam partai politik demi memperjuangkan kepentingan perempuan perbatasan.

Dampak partisipasi perempuan perbatasan saat pemilu di Papua belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar perempuan perbatasan. Hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan perempuan perbatasan dan juga budaya patriarki di Papua yang tidak mengizinkan perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan diluar rumah atau aktivitas politik. Sehingga walaupun Euforia pemilu di Papua di perbatasan terlihat sangat tinggi namun dampaknya bagi perempuan perbatasan sangat kecil.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, yaitu partisipasi perempuan sebagai pemilih di kampung perbatasan Skouw Mabo, Skouw Yambe dan Skouw Sae sangat tinggi. Karena pada saat pemilihan pemilihan Umum kepala daerah Gubernur Provinsi Papua, sebagian besar pemilih perempuan berpartisipasi aktif menyalurkan suaranya ke TPS-TPS. *Kedua*, terdapat faktor pendorong dan penghambat tingkat partisipasi perempuan perbatasan pada saat pemilu. Faktor Pendorong tingginya partisipasi perempuan perbatasan pada saat pemilu adalah dorongan dari dalam diri bahwa dengan menyalurkan aspirasinya maka kebutuhan perempuan atau pembangunan responsive gender akan terjadi di perbatasan Skouw Papua. Sedangkan faktor penghambat partisipasi perempuan sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah adalah rendahnya sumber daya perempuan perbatasan.

Saran

Pertama, kepala daerah terpilih agar membuat peraturan daerah yang responsive gender terhadap pembangunan perempuan perbatasan. Terkait sarana air bersih, perumahan

² Lola Amelia, Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute dalam <https://www.theindonesianinstitute.com/mencermati-partisipasi-politik-perempuan/diakses-pada-08-Juli-2018,-Jam-14.50-WIT>.

yang layak, pemasaran kerajinan tangan, akses pariwisata dikampung Skouw yang memberi kontribusi bagi perempuan perbatasan. *Kedua*, pemerintah hendaknya fokus pada pembangunan manusia khususnya perempuan perbatasan sehingga beberapa waktu kedepan ada perempuan perbatasan yang tampil dipangung politik dan dapat membawa perubahan bagi perempuan perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin Burhan, (2008), Penelitian Kualitatif, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana Media Prenada Press.
- Emzir, (2014), Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta, Rajawali Press.
- Luhulima, Achie Sudiarti, (2014), CEDAW Menegakan Hak asasi Perempuan, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Neuman WL, (2007), Social Research and Methods Qualitative and quantitative Approach, Fourth Edition, Boston, Allyn& Bacon Press.
- Sobar Sutisna, Dkk, (2010), Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas, Yogyakarta, Graha Ilmu Press.
- Trimayuni, Pande. & Ani Soetjipto, (2013), Gender dan Hubungan Internasional, Yogyakarta, Jalasutra Press.
- https://www.kompasiana.com/denisgoetzhe/peran_wanita_dlam_pembangunan_pedesaan-54f77db0a333114c
- <https://www.theindonesianinstitute.com/mencermati-partisipasi-politik-perempuan/> diakses 8 Juli 2018. Jam 14.50 wit.